

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, Kabupaten Bogor di dominasi oleh penduduk suku Sunda dengan jumlah sekitar 5,8 juta pada tahun 2019. Kantor DPRD Kabupaten Bogor merupakan salah satu kantor yang berfungsi untuk mendukung sekaligus mengawasi kegiatan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang di ajukan oleh kepala daerah. Kantor yang sehari-hari mereka gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD maupun pegawai PNS honorer dan *outsourcing* berpengaruh besar terhadap motivasi dan kinerja para pegawai. Selain itu, lingkungan kerja seperti kondisi kerja serta keamanan dalam bekerja juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja para pegawai.

Sangat disayangkan masih ada bangunan maupun beberapa ruang kantor DPRD Kabupaten Bogor yang belum terakomodasi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal yang terdapat pada Pasal 17 Ayat 2. menjelaskan bahwa bangunan-bangunan gedung baru/*modern* yang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur dan/atau ragam hias ornamen tradisional. Kondisi kerja dikatakan baik apabila memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dari segi kondisi fisik maupun kondisi psikologis. Agar terciptanya kinerja yang baik, harus didukung oleh desain interior dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan standar. Menurut penulis, masih terdapat beberapa permasalahan interior di kantor DPRD Kabupaten Bogor yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya kinerja karyawan dalam bekerja, seperti pengoptimalisasian desain interior pada fungsi ruang yang kurang baik, sirkulasi area kerja yang belum tertata dengan baik yang dapat menyebabkan aktivitas kerja karyawan tidak optimal dan efisien. Kenyamanan dalam ruang kerja masih belum maksimal seperti penggunaan kaca pada fasad bangunan yang menyebabkan ruang terasa panas pada siang hari.

Keamanan pada ruang VIP belum sesuai standar karena penempatan ruang VIP yang tidak *private* dapat berisiko tinggi untuk dilalui orang, ruang rapat paripurna penggunaan furnitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar menyebabkan ruang terasa sempit, dan tidak memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk bekerja.

Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, maka dibuatlah Perancangan Interior Re-Desain Kantor DPRD Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk memperbaiki segala aktivitas yang belum mendukung, mengatur sirkulasi ruang atau tata letak ruangan menjadi lebih efektif, menciptakan sebuah kantor pemerintah yang dapat mengangkat identitas kantor DPRD Kabupaten Bogor itu sendiri dan membuat pada setiap pengguna merasa nyaman dan aman ketika berada dikantor.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memberi arah pada penelitian ini, maka disusun beberapa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalisasian desain interior pada fungsi ruang yang kurang baik.
2. Pengorganisasian ruang-ruang kantor yang kurang baik.
3. Tidak mengadopsi visi dan misi dari DPRD itu sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengoptimalisasikan beberapa fungsi ruang kantor DPRD yang kurang baik?
2. Bagaimana perancangan desain bisa memaksimalkan pengorganisasian ruang-ruang kantor yang masih belum baik dengan mengaplikasikan desain?
3. Bagaimana perancangan desain agar dapat menjadi kantor yang berinterior mengadopsi identitas kantor?

1.4 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin capai dalam Perancangan Interior kantor DPRD Kabupaten Bogor, antara lain:

1. Menciptakan interior ruangan yang memadai dengan pengelolaan tata letak ruang yang lebih efisien guna memberikan kenyamanan terhadap pengguna ruang (Anggota DPRD, PNS,

Honorar dan *Outsourcing*).

2. Menerapkan desain kantor yang sesuai dengan tema konsep yang akan diangkat.
3. Menciptakan suasana ruang rapat paripurna yang sesuai dengan standar desain interior yakni mendesain secara menyeluruh penataan furnitur pada ruang rapat paripurna agar lebih terstruktur dengan baik.

1.5 Batasan Masalah

Pada perancangan desain interior DPRD Kabupaten Bogor dengan pendekatan konsep identitas kantor ini permasalahan dibatasi, antara lain:

1. Ruang kantor dalam batasan masalah pada perencanaan ini yang terdapat pada kantor terdiri dari:
 - *Site Plan* yang terletak di Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Jawa Barat, Indonesia.
 - Status kantor milik pemerintah ini menjadi salah satu batasan perancang yang harus mengikuti standar dari pemerintah.
 - Luasan kantor yang kurang dianggap tidak seimbang dengan jumlah pengguna dan aktifitas penggunanya
2. Selain dari jenis bangunan pemerintahan yang terkesan formal untuk kantor DPRD Kabupaten Bogor, batasan masalah yang terdapat pada perancangan kantor yaitu pada unsur karakteristik kantor DPRD Kabupaten Bogor yang memiliki beberapa kriteria yang tidak bisa diubah secara menyeluruh. Batasan masalah yang dimaksud meliputi pemilihan penerapan pada interior, dan pemilihan jenis pencahayaan, yaitu menggunakan teknologi pencahayaan LED yang secara paralel dengan penyimpanan/pemasangan dengan cara *indirect*, sehingga tidak terlalu mengganggu pengguna ruang.

1.6 Manfaat

1. Manfaat bagi pengguna:

- Menghasilkan studi spesifik tentang karakter tematik kontemporer terhadap terciptanya sensasi pengalaman pekerjaan di pemerintahan.
- Diharapkan proses perancangan interior kantor DPRD Kabupaten Bogor dengan

pendekatan konsep identitas budaya ini dapat menjadi referensi/acuan kantor-kantor pemerintahan yang lain agar dapat memberikan sensasi ruang spesial/kebetahan dalam ruang yang sesuai dengan kaidah-kaidah desain interior yang ada.

2. Manfaat bagi masyarakat:

- Masyarakat tersuguhkan dengan suasana kantor yang memiliki nuansa yang menarik yang memicu daya pikat masyarakat ketika berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Bogor.

3. Manfaat bagi bidang interior:

- Perancangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang interior untuk perancangan lanjutan di masa yang akan datang dan menjadi inspirasi di bidang interior.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan objek perancangan dan masalah pada objek perancangan. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk perancangan interior kantor DPRD Kabupaten Bogor ini dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Mempelajari dengan metode membaca buku referensi yang berkaitan dengan studi literatur standarisasi kantor.

2. Observasi

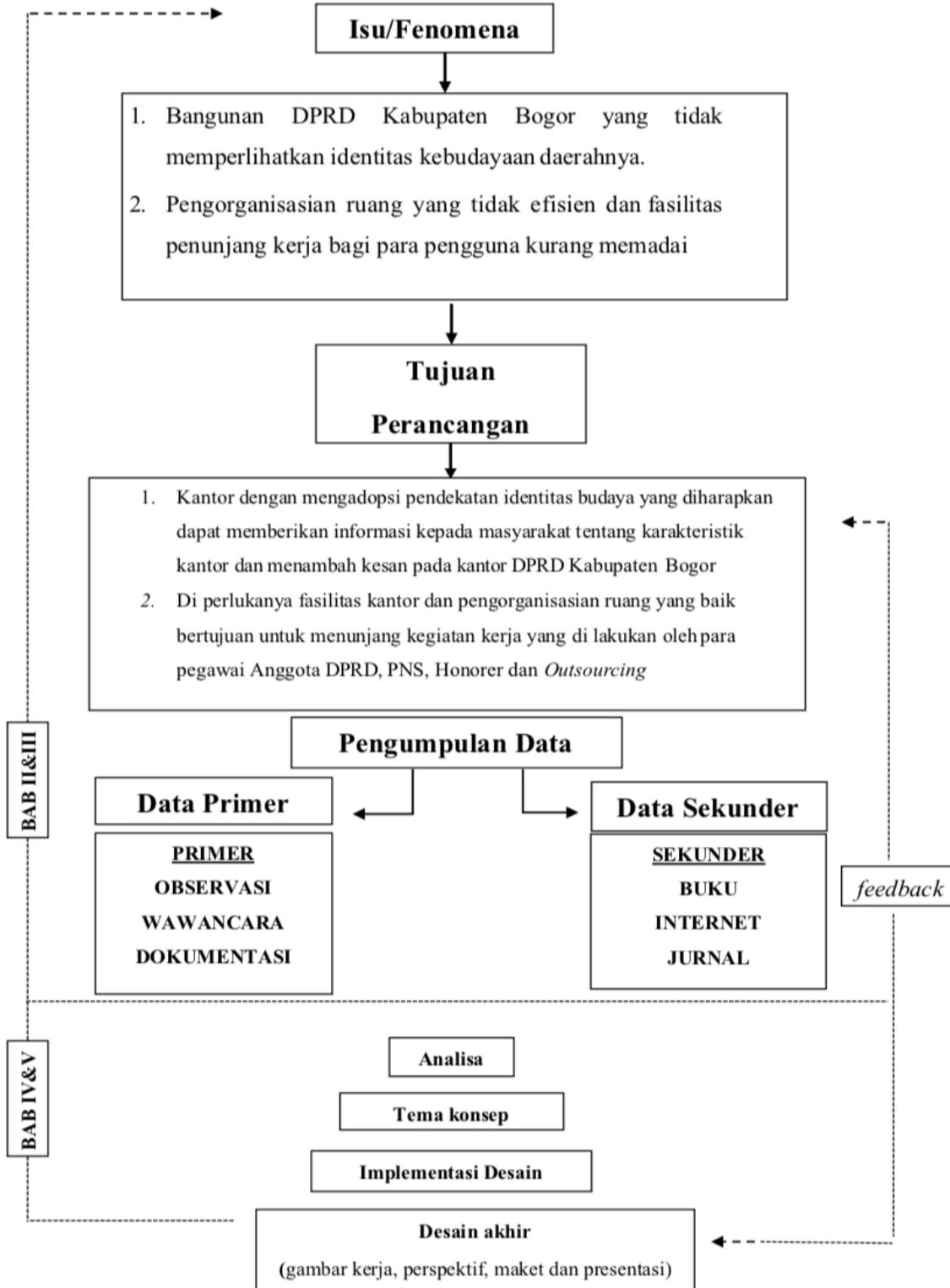
Tahap metode observasi pada setiap ruang yang digunakan oleh para pegawai untuk mengetahui fungsi dan manfaat ruang yang digunakan oleh para pegawai.

3. Wawancara

- Metode wawancara dilakukan bersama Bapak Rudy Susmanto, S.Si selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Drs. Ronny Sukmana, M.Si selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Bogor, Bapak Drs. Indra Komara, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bapak Muhammad Saka, S.E Kepala Sub. Bagian Tata Bangunan DPRD Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang instansi yang akan dirancang, kemudian hasil yang didapat dalam tahap wawancara dengan beberapa narasumber dan dirangkum dalam bentuk tulisan.
- Metode wawancara dilakukan bersama Bapak H. Edwin Senjaya, S.E., MM selaku Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung.

- Metode Wawancara dilakukan bersama Bapak Agus Satriadji selaku humas bagian umum DPRD Kota Bandung.
- Metode wawancara dilakukan bersama Bapak Ence Setiawan selaku Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDIP, Bapak H.M Doddy Hikmawan, S.E selaku Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS dan Bapak Sendhy Pratama, SH., M.

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir